

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan pendidikan di Indonesia yang tercantum dalam UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itulah, pendidikan di Indonesia terus ditingkatkan mutunya agar tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai dengan efektif.

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sumber daya manusia seutuhnya. Terlebih pada era globalisasi seperti sekarang ini dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang pesat dan sangat berpengaruh serta membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia. Di satu sisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini bermanfaat bagi manusia, namun di sisi lain dampak dari perkembangan ini akan membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat.

Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka bangsa Indonesia perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang dilakukan secara terencana dan terarah sehingga bisa tercapai tujuan pendidikan nasional secara efektif dan efisien. Peningkatan dalam bidang pendidikan ini perlu dititikberatkan pada pengembangan kualitas fisik dan mental pada generasi muda agar mampu meneruskan perjuangan generasi-generasi sebelumnya.

Di Indonesia pernah menerapkan sistem sentralisasi pendidikan dimana pemerintah memiliki wewenang penuh dalam mengatur kebijakan pendidikan. Dengan adanya sistem sentralisasi pendidikan tersebut setiap sekolah hanya tinggal menunggu instruksi dari pemerintah pusat dalam melaksanakan kegiatan pendidikan.

Tetapi sekarang di Indonesia telah menerapkan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan tersebut menuntut adanya otonomi di bidang pendidikan yang

kemudian sistem sentralisasi pendidikan ini mengalami perubahan dan digantikan dengan sistem desentralisasi pendidikan dimana pemerintah masih memiliki wewenang tetapi tidak secara penuh dalam mengatur kebijakan pendidikan. Perubahan tersebut memiliki alasan bahwa dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah ditegaskan sistem pendidikan setralistis yang telah berjalan kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Yaitu kurang bisa mengakomodasi keberagaman daerah, keberagaman sekolah, dan keberagaman peserta didik selain itu juga cenderung terhambatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Setelah adanya desentralisasi pendidikan ini masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Pemberian otonomi ini juga menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan komponen masyarakat secara efektif untuk mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Dalam rangka inilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tampil sebagai alternatif manajemen pendidikan. MBS merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi kepada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi, dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan dari MBS adalah meningkatkan mutu pendidikan, yakni dengan memandirikan sekolah untuk mengelola lembaga bersama pihak-pihak terkait (guru, peserta didik, masyarakat, wali murid, dan instansi lain). Dengan demikian, sekolah dan masyarakat tidak perlu menunggu lagi instruksi dari atas dalam mengambil langkah-langkah untuk memajukan pendidikan. Sekolah dapat mengembangkan visi pendidikan sesuai dengan keadaan setempat dan melaksanakan visi tersebut secara mandiri.

Menurut Hadiyanto (2004: 68) target utama MBS di Indonesia adalah pemberdayaan sekolah untuk secara mandiri meningkatkan mutu pendidikan masing-masing. Oleh karena itu, kemampuan manajemen dan kepemimpinan dari kepala sekolah serta kesediaan sumber yang memadai merupakan persyaratan untuk mencapai keberhasilan MBS di masa depan. Sehingga kemampuan kepala sekolah sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui MBS.

Dengan demikian, adanya peraturan otonomi daerah yang mengubah sistem sentralisasi pendidikan menjadi desentralisasi pendidikan ini menuntut lembaga pendidikan atau sekolah agar memiliki pemimpin yang berkualitas yang mempunyai keterampilan dalam memimpin dan mengelola sekolah dengan baik selain itu kepala sekolah mempunyai kemampuan dalam menyusun visi sekolah dengan jelas dan dilengkapi dengan sasaran dan tujuan yang konsisten yang sehingga bisa mewujudkan tujuan pendidikan nasional serta dapat meningkatkan mutu pendidikan agar bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan handal.

Keberhasilan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak akan tercapai jika kepala sekolah bergerak sendiri, tetapi harus ada campur tangan dari tenaga pendidik. Dalam hal ini yang dimaksud pendidik di sekolah adalah guru. Guru berperan sangat penting dalam kegiatan pendidikan yaitu pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan hal pokok yang harus ada dalam kegiatan pendidikan. Sedangkan keberhasilan proses pembelajaran tergantung pada guru yang mengajar. Jika kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran baik maka keberhasilan dalam proses pembelajaran akan tercapai secara efektif. Oleh karena itu, dengan kinerja guru yang baik dalam pelaksanaan proses pembelajaran dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam uraian di atas guru berperan sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pendidikan menuntut adanya kinerja guru yang baik merupakan hal yang tepat. Dalam UU RI No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dikatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesi.

Selain itu, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dalam meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru. Salah satu kebijakan yang ditetapkan pemerintah yaitu disahkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tentang guru dan dosen, standar nasional pendidikan dan sertifikasi guru. Kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 14 tahun 2005 yang berkaitan dengan sertifikasi yaitu semua guru diwajibkan untuk memiliki ijazah S-1 atau D-4 sehingga kedepan paling lambat tahun 2015 semua guru di wilayah Republik Indonesia bergelar sarjana dan bersertifikat pendidik. Ini semua dilakukan untuk memberikan penghargaan terhadap profesi guru, meningkatkan kesejahteraan guru, sekaligus meningkatkan kinerja para guru dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Walaupun sudah adanya kebijakan tersebut pada kenyataannya kinerja guru di Indonesia belum sepenuhnya baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru pada tahun 2015 dari nilai kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik. Rata-rata Uji Kompetensi Guru nasional 53,02, sedangkan pemerintah menargetkan rata-rata nilai di angka 55. Selain itu, rerata nilai profesional 54,77, sedangkan nilai rata-rata kompetensi pedagogik 48,94 ([sergur.kemdiknas.go.id](http://sergur.kemdiknas.go.id)).

Kepala sekolah merupakan pejabat profesional yang ada dalam organisasi sekolah, yang mengatur semua sumber daya sekolah dan bekerja sama dengan guru-guru, staf, dan pegawai lainnya dalam mendidik peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kepala sekolah merupakan pemimpin yang mempunyai peranan penting dalam mengembangkan dan meningkatkan lembaga pendidikannya. Di zaman modern seperti sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai pengaruh yang sangat besar dikarenakan dunia pendidikan selalu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat. Untuk menghadapi hal tersebut maka kepala sekolah dituntut untuk bisa meningkatkan kinerja para guru agar bisa meningkatnya mutu pendidikan

sehingga tercapainya tujuan pendidikan yang pada akhirnya kepercayaan masyarakat terus bertambah.

Sekolah Menengah Kejuruan Prawira Marta yang berada di Kartasura, merupakan sekolah swasta yang berdiri dibawah naungan yayasan pendidikan Oxford Course Indonesia. Sekolah tersebut memiliki kepala sekolah yang bisa dikatakan mempunyai kinerja yang baik. Dengan waktu kepemimpinannya kurang lebih berjalan 4 tahun ini berbagai perubahan ke arah yang lebih baik sudah banyak dilakukan oleh kepala sekolah di SMK tersebut. Menurut salah satu guru di Sekolah tersebut, SMK Prawira Marta yang dulunya bisa dikatakan sebagai sekolah yang kurang terpendang oleh masyarakat dengan jumlah peserta didik yang tergolong sangat kurang, tetapi dengan semangat dan kepintaran yang dimilikinya, kepala sekolah bersama para guru disana terus mencoba berbagai strategi sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Saat ini kepala sekolah di SMK tersebut dikatakan cukup berhasil dalam memajukan sekolah terbukti dengan kepercayaan masyarakat yang terus bertambah sehingga jumlah peserta didik mengalami peningkatan, pembangunan gedung dan ruang kelas yang juga terus bertambah, dan akhirnya bisa menyelenggarakan pendidikan dengan lancar dan nyaman. Tidak hanya itu, dalam hal kesejahteraan guru pun juga digagasnya, dahulu yang gurunya kurang kompak sekarang bisa menjadi lebih kompak, dahulu para guru yang memiliki kinerja kurang baik atau kurang maksimal dalam menunjukkan potensinya dengan berbagai upaya yang telah dilakukan kepala sekolah sekarang kinerja guru sudah menjadi lebih meningkat. Dengan meningkatnya kinerja guru itulah para guru di sekolah tersebut bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional sehingga tujuan dalam pembelajaran bisa tercapai yang secara otomatis bisa tercapainya tujuan sekolah atau pendidikan.

Kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di organisasi sekolah sangat berpengaruh terhadap kemajuan sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja para guru merupakan suatu keharusan terlebih pada sekolah kejuruan, guru dituntut untuk menguasai bidang yang diampunya. Karena guru merupakan faktor penentu tinggi rendahnya suatu pendidikan, maka

kepala sekolah melakukan penilaian kinerja guru baik secara individual maupun keseluruhan agar mengetahui keadaan kinerja guru yang baik dan yang kurang baik. Jika didapatkan hasil yang kurang baik kepala sekolah bisa mengambil tindakan atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Melihat dari di atas tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Upaya Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SMK Prawira Marta Kartasura.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMK Prawira Marta Kartasura?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMK Prawira Marta Kartasura.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Sebagai bahan masukkan dalam meningkatkan kinerja guru khususnya di SMK.
  - b. Sebagai bahan informasi tentang pentingnya upaya kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja guru dalam pendidikan.
  - c. Sebagai bahan informasi dalam mengembangkan lembaga pendidikan,
2. Secara praktis

Bagi kepala sekolah penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi maupun pengembangan pembelajaran di sekolah. Serta penulis dapat mengetahui kinerja guru khususnya di SMK Prawira Marta Kartasura.